

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persaingan global, pengembangan ekonomi lokal perlu diarahkan untuk mendukung perkembangan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan perbandingan modal yang luas dan memiliki prospek yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan di suatu negara (Rajindra, 2018:2). Krisis yang terjadi di Asia mengalami penurunan drastis karena adanya pembatasan transaksi modal seperti pelanggaran dan pembatasan jumlah modal yang menghambat pergerakan modal dengan membuat transaksi tersebut lebih mahal disebabkan penerapan sistem nilai tukar multiple atau pengenaan pajak. Sehingga menciptakan efek yang tidak stabil pada arus modal terhadap perekonomian diberbagai negara. (Siswanto 2000 dalam wahyuni, 2017:2).

Adapun masalah pada negara lainnya seperti Malaysia, Thailand, Korea Selatan mulai dari adanya kekhawatiran akan ketidakmampuan mengendalikan inflasi dan ketidakstabilan dipasar keuangan dan perbatasan perdagangan mata uang di luar negeri sehingga para pemodal menjadi khawatir atas krisis yang sama sehingga pemodal cenderung menarik investasinya kembali (Wahyuni, 2017:4)

Permasalahan di Indonesia adalah kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola usaha seperti bidang manajemen, kemampuan dalam bidang permodalan, teknis operasional dan administrasi usaha/akutansi. Modal dalam pengelolaan usaha mengalami kemajuan atau kemunduran, bahkan usaha tidak berlangsung lama, banyak dana pribadi yang dijadikan modal usaha tetapi tidak sesuai dengan pendapatan/pengeluarannya, dikarenakan kurangnya kemampuan dalam mengelola dan menghitung secara tepat dalam pengelolaan

modal (Panelewen, 2020:2). Selain itu menggunakan modal pinjaman diperoleh dari lembaga lain yang sudah pasti disertai dengan berbagai kewajiban untuk membayar jasa seperti bunga, biaya administrasi, materai dan asuransi serta wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang sudah disepakati (Yunus, 2021:4) Sehingga tidak sedikit pelaku usaha mengambil jalan pragmatis dengan mencari permodalan dari rentenir atau pelepas uang dikarenakan menurut perbankan atau lembaga keuangan pelaku usaha tidak layak karena tidak memiliki agunan dan kemampuan mengembalikan pinjaman yang rendah (Purwanti, 2017:2).

Modal bagi pengusaha yang minim berdampak pada sulitnya meningkatkan produktivitas yang berakibat pelaku usaha sulit untuk berkembang (Danendra dkk, 2015:3). Namun sebaliknya, kelebihan modal akan berdampak pada dana tidak produktif dan dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha karena dapat kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan (sofini, 2017:2).

Adapun permasalahan lainnya berupa permasalahan internal maupun eksternal. Permasalahan intern belum adanya pembinaan yang memadai dan kurangnya akses kredit untuk modal. Sedangkan permasalahan ekstern kurangnya kualitas SDM dan lemahnya struktur manajemen organisasi dalam bidang permodalan (Manning 1996 dalam danendra, 2015: 2). Kurangnya SDM yang kompeten ditambah kurangnya profesional mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang diperoleh bagi pelaku usaha (Fadhil, 2019:2). Selain itu, dalam penggunaan modal kerja dibutuhkan laporan keuangan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. karena ketersediaan dana kegiatan usaha tidak akan berjalan lancar tanpa diiringi dengan laporan keuangan dengan baik dan benar. Sebab modal kerja dalam periode tertentu harus didiskripsikan dalam bentuk perubahan atas laporan keuangan (Salombe dkk, 2017:3).

Dalam pelaksanaan kegiatan pelaku usaha banyak yang tidak mengetahui tentang tata kelola keuangan dengan menggunakan laporan keuangan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi sehingga lemahnya dalam pemahaman pencatatan laporan keuangan (Sugiarti, 2020:4) Permasalahan lainnya pelaku usaha masih mencatat laporan keuangan dengan sederhana yang mengakibatkan pelaku usaha tidak mendapatkan input (informasi) yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan karena tidak adanya perbandingan hasil laporan keuangan dari tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Selain itu, rendahnya kualitas penyajian pencatatan laporan keuangan disebabkan pelaku usaha belum bisa memisahkan administrasi pribadi dengan keuangan perusahaan yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan kreditur maupun investor yang disebabkan kesulitan dalam mengetahui seberapa besar keuntungan yang diberikan atas usahanya (Purwanti 2017:3).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis berupaya untuk mengkaji tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pelaporan Penanaman Modal. Yang penulis tuangkan kedalam judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pelaporan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang muncul yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

1.3 Batasan Masalah

Untuk lebih fokus dan paham terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk memberi arahan pada pembahasan penelitian ini. Dinas

Penanaman modal merupakan sebuah lembaga yang bergerak dibidang perizinan, segala bentuk urusan dalam perannya sebagai lembaga pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintah dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah dan berpengaruh terhadap perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, maka dari itu, peneliti membatasi masalah pada akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan penanaman modal.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka, rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana akuntabilitas pengetahuan dan kepatuhan atas pengelolaan dan pelaporan penanaman Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena praktik akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan Penanaman Modal Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi lampung.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta pertimbangan bagi pihak yang membutuhkan terkait Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pelaporan Penanaman Modal Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Lampung, Dan bagi masyarakat umum dapat memberikan gambaran secara rinci terkait pengelolaan dan pelaporan ddinas penanaman modal sehingga dapat dijadikan referensi dalam pengembangan penanaman modal .

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberi informasi tentang seberapa besar Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pelaporan Penanaman Modal Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan bermanfaat dan menjadi landasan untuk mengambil keputusan dalam penanaman modal.